

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN PADANG LAWAS

Zulkarnaen Lubis *
Dr. Danialsyah, S.H.,M.H **
Dr. Cut Nurita, SH.MH ***

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah penduduk berpotensi meningkatkan kebutuhan akan tanah, di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak bertambah. Sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah kawasan hutan. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya pembakaran hutan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yakni bagaimana pengaturan hukum pembakaran hutan di Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan di Kabupaten Padang Lawas, bagaimana hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Padang Lawas.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder dan penelitian lapangan. Data primer dan sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Pengaturan hukum tindak pidana pembakaran hutan diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa mengelola hutan dan lahan dengan cara membakar dapat dipidana dan apabila perbuatan itu dilakukan oleh untuk dan atas nama korporasi maka korporasi yang bertanggung jawab. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Padang Lawas dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dengan melakukan tahap-tahap dimulai dari penerimaan laporan yang masuk mengenai kebakaran hutan dan lahan.

Hasil penelitian yaitu Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Padang Lawas dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ialah faktor sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, kesadaran masyarakat dalam hal lingkungan, dan faktor sosial. Upaya yang telah dilakukan adalah mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dilakukan kordinasi dengan pihak pemerintah dan masyarakat dengan melakukan himbauan pada masyarakat mengenai pidana membakar hutan dan lahan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembakaran, Hutan.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF FOREST BURNING CRIMINAL ACTS IN PADANG LAWAS REGENCY

Zulkarnaen Lubis *
Dr. Danialsyah, S.H.,M.H **
Dr. Cut Nurita, SH.MH ***

ABSTRACT

The increasing population has the potential to increase the need for land, on the other hand, faced with the fact that the land area does not increase. The easiest target to access is the forest area. This is what opens up opportunities for forest fires. The formulation of the problem in this thesis research is how the legal regulation of forest fires in Indonesia, how the law is enforced against perpetrators of forest fires in Padang Lawas Regency, what are the obstacles and efforts in overcoming criminal acts of forest fires in Padang Lawas Regency.

The research method used is descriptive analysis which leads to normative and empirical legal research, namely research conducted by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials and field research. Primary and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials

The legal regulation of criminal acts of forest fires is regulated in Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law No. 39 of 2014 concerning Plantations which states that managing forests and land by burning can be punished and if the act is carried out by and on behalf of a corporation then the corporation is responsible. Law enforcement against criminal acts of forest burning in Padang Lawas Regency is carried out in accordance with applicable laws and regulations by carrying out stages starting from receiving reports regarding forest and land fires.

The results of the study are that obstacles in overcoming criminal acts of forest burning in Padang Lawas Regency are influenced by several factors including legal facilities, law enforcement officers, facilities and infrastructure, public awareness in terms of the environment, and social factors. Efforts that have been made are to prevent forest and land fires by coordinating with the government and the community by providing an appeal to the community regarding the crime of burning forests and land.

Keywords: Criminal Responsibility, Burning, Forests.

**Student of Law Program, Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of Law Program, Islamic University of North Sumatra*

***Supervisor II of Law Program, Islamic University of North Sumatra.*